

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997).

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025).

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2023).

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 813 Tahun 2021).

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pendataan, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Tanah Terlantar (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2024).

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021).

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendataan, Pelaporan Tanah Terindikasi Telantar, dan Pemanfaatan Tanah dan Kawasan Telantar (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2022).

Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 73 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 73 Tahun 2016).

Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 70 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 70 Tahun 2016).

## **2. Buku**

Amirudin, Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi Kedua)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Arba, H. M.. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan, dan Penggunaan Tanah Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, *Petunjuk Teknis Penertiban dan Penetapan Tanah Telantar*, Juknis Nomor 3/Juknis-700.TL.03.02/II/2022.
- Friedman, Lawrence M., 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York, Russel Sage Foundation.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (M. Khozim, Penerjemah). Nusa Media, Bandung tahun 2013.
- Garner, Bryan A., 1999, *Black's Law Dictionary (7th ed.)*. St Paul MN: West Group
- Hajati, Sri, et al. 2021. *Politik Hukum Pertanahan Indonesia*. Kencana, Jakarta.
- Harsono, Budi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Penjelasannya, Edisi Revisi*. Djambatan, Jakarta.
- Huda, Ni'Matul, 2023, *Politik Hukum dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Ismail, Nurhasan, 2024, *Hukum Pengurusan dan Pendaftaran Hak atas Tanah: Teori dan Praktik*. Setara Press, Malang.
- Jatmiko, Agus dan Arditya Wicaksono, 2020, *Kajian Kebijakan Penertiban Tanah/Kawasan Tanah Terlantar*. Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2022. *Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.

- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Liberty, Yogyakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S. Hiariej, 2023, *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Mujiburohman, Dian Aries, 2019, *Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*. STPN Press, Yogyakarta.
- Santoso, Urip, 2012. *Hukum Agraria (kajian Komprehensif)*. Kencana Prenamedia Grup, Jakarta.
- Sasmitha, Tody, Haryo Budhiawan, Sukayadi. 2014. *Pemaknaan Hak Menguasai Negara oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian terhadap Putusan MK No. 35/PUU-X/2012; Putusan MK No. 50/PUU-X/2012 dan Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010)*, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Shodiq, M. D., 2023, *Budaya Hukum*, Mafy Media Literasi Indonesia, Solok.
- Soetarto, Endriatmo 2019, *Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*. STPN Press, Yogyakarta.
- Sholahudin, Umar, 2024, *Keadilan Agraria: Melerai Dualisme Hukum Rakyat dan Hukum Negara*. Intrans Publishing, Malang.
- Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Alfabeta: Bandung.
- Sumardjono, Maria S.W. 2009, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Kompas, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W, 2019, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, UGM Pers, Yogyakarta.
- Supriadi. 2012. *Hukum Agraria*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2007. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Rajagrafindo Pustaka, Depok.

- Rizki, Budi, 2020, *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Heros Fc, Lampung.
- Vollenhoven, C.V. 1975. *De Indonesier en zijngroend. Orang Indonesia & Tanahnya*. Soewargono (Ed.). Jakarta: Pusat Pendidikan Dalam Negeri.
- Parlindungan, A.P, 1998, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung.
- Wahyuni, Diana, et. all. 2024. *Masihkah Layak Indonesia Disebut Negara Agraris? Kumpulan Artikel untuk Memeriahkan Hari Tani Nasional*. Jaringan Pantau Gambut, Jakarta.
- Warassih, Esmi, 2014, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Warassih, Esmi, et..al., 2020, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar Dimensi Hukum dan Masyarakat*. Litera, Yogyakarta.
- Widiarty, Wiwik Sri, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta.

### 3. Jurnal

- Afdhali, Dino Rizka dan Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”. *Collegium Studiosium Journal*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023.
- Ahadi, Lalu M. Alwin, “Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum”. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2022.
- Allot, Anthony, “The Effectiveness of Laws”. *Valparaiso University Law Review*, Vol. 15, No. 2, Tahun 1981.
- Cahyaningsih, Diana Tantri, “Mengurai Teori *Effectiveness of Law* Anthony Allot”. *Jurnal Rechtsvinding Online*, Tahun 2020.
- Candraswati, Hartana, I.G.A.A. Mas. “Hukum Tanah sebagai Bagian dari Hukum Agraria dalam Pembangunan Nasional di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 7, No. 3 Tahun 2019.
- Doly, Denico, “Kewenangan Negara dalam Penguasaan Tanah: Redistribusi Tanah Untuk Rakyat”, *Negara Hukum*, Vol. 8, No. 2, November 2017.

- Earlene, Felishella dan Benny Djaja, “Implikasi Kebijakan Reforma Agraria terhadap Ketidaksetaraan Kepemilikan Tanah Melalui Lensa Hak Asasi Manusia”, *Tunas Agraria*, Vol. 6, No. 2, Mei 2023.
- Fajar, Habib Ferian, et.al, 2022, “Strategi Kebijakan Reforma Agraria dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan Sosial dengan Berasaskan Konstitusi”. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 9, September 2022.
- Kunu, Andi Bustamin Daeng, “Kedudukan Hak Menguasai Negara atas Tanah”. *Jurnal Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2012.
- Lenaini, Ika, “Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling”. *Jurnal Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 6, No. 1.
- Magnar, et, all. “Tafsir MK atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi atas Putusan MK mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, Februari 2010.
- Mathar Ahmad, “Sanksi dalam Peraturan Perundang-Undangan”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2.
- Nadhira, Putri, et, al. “Pembatalan Keputusan Tentang Penetapan Tanah telantar atas Hak Atas Tanah”. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, Maret 2024.
- Nurahmani, Aditya, 2024, “Reforma Agraria dan Tembok Ego Sektoral: Merumuskan Alternatif Penyelesaian”, *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 8, No. 2.
- Nurlinda, et, al. “Perbandingan Penanganan Tanah telantar di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Sukabumi dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, No.1, Januari 2014.
- Prabowo, Rossi, Aziz Nur Bambang, Sudarno. “Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Lahan Pertanian. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, Vol. 16, No. 2, Tahun 2020.
- Prasista, et, al. “Pengaturan Tanah telantar dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pertanahan”. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 3, Tahun 2022.

- Rahmawati, Sofia. “Analisis Yuridis Tanah telantar Berstatus Hak Guna Usaha”. *Prosiding Seminar Nasional Instiper*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Redi, Ahmad, “Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, Juni 2025.
- Ramadhan, et. al. “Penertiban Tanah telantar dalam Rangka Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah”. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 11, No. 1, Mei 2022.
- Saad, Sudirman, “Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Islam, dan Yurisprudensi”. *Hukum dan Pembangunan*, Vol. 21, No. 1. Dalam Harris Y.P. Sibuea, “Efektivitas Pengaturan Penertiban Tanah Terlantar”. *Kajian*, Vol. 26, No. 1, 2021.
- Sirait, et. al. “Arahan Pengembangan Hutan Rakyat untuk Penanganan Lahan Kritis di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat”. *Jurnal Tata Loka*, Vol. 23, No. 3, Agustus 2021.
- Sulaiman, King Faisal, “Polemik Fungsi Sosial Tanah dan Hak Menguasai Negara Pasca UU Nomor 12 Tahun 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 1, 2021.
- Simatupang, Taufik H., “Tanggung Jawab dan Kewajiban Hak atas Tanah bagi Pemiliknya (Kajian Land Reform: Hukum Sebagai Sarana Melakukan Perubahan Sosial Masyarakat)”, *Lex Journalica*, Vol. 12, No. 3, Desember 2015.
- Sulistyaningsih, Retno. “Reforma Agraria di Indonesia”. *Jurnal Perspektif*, Vol. 26, No. 1, 2021.
- Sulistio, Meiliyana. “Politik Hukum Pertanahan di Indonesia”. *Jurnal Education and Development*, Vol 8, No. 2, 2020.
- Sibuea, Harris Y.P., “Efektifitas Pengaturan Penertiban Tanah Terlantar”, *Kajian*, Vol. 26, No. 1, Tahun 2021.
- Zarbiyani, Farhan, dan Amad Sudiro. “Penetapan Tanah telantar sebagai Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum dalam Penertiban Kawasan Tanah telantar”. *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3, Desember 2023.

#### 4. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Fatkhurrahman Surya Samudra. “Pelaksanaan Penertiban Tanah telantar di Wilayah Provinsi Jawa Tengah”. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, 2023.

Mohammad Paurindra Ekasetya. “Penertiban Tanah telantar di Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal”. *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019.

#### 5. Internet

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, “Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2024”. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi 2024, diakses pada 3 Juni 2025 <https://sukabumikab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDYjMg==/-komponen-ipc-rata-rata-lama-sekolah.html>

Kumparan.com, “BPS Ungkap Karakteristik Rumah Tangga Miskin Ekstrem, Paling Banyak Petani”. Kumparan.com, diakses pada 3 Juni 2025 <https://kumparan.com/kumparanbisnis/bps-ungkap-karakteristik-rumah-tangga-miskin-ekstrem-paling-banyak-petani-23Qqf3C9QYF/full>

Tim Hukumonline, “15 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum”. *Hukumonline.com*, 2024, diakses pada 25 April 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/?page=3>

Harijanti, Susi Dwi, “Pemilu, Demokrasi, dan Reformasi Hukum”, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, *Orasi Ilmiah*, Tahun 2023, [https://www.jentera.ac.id/wp-content/uploads/2023/09/Jentera\\_Orasi-Ilmiah\\_Pemilu-Demokrasi-dan-Reformasi-Hukum.pdf](https://www.jentera.ac.id/wp-content/uploads/2023/09/Jentera_Orasi-Ilmiah_Pemilu-Demokrasi-dan-Reformasi-Hukum.pdf)